

LITERATUR ISLAM PADA PERPUSTAKAAN MASJID RAYA

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya setiap perpustakaan memiliki sejarah, latar belakang, tujuan, anggota, organisasi, dan kegiatan yang berbeda satu dengan lainnya. Di samping itu juga terdapat perbedaan tanggapan terhadap jenis pustaka, keperluan informasi, dan spesialisasi subjek. Perbedaan-perbedaan tanggapan terhadap berbagai faktor tersebut di atas melahirkan berbagai jenis dan ragam perpustakaan, seperti perpustakaan internasional, perpustakaan nasional, perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan swasta (pribadi), dan perpustakaan khusus.

Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang yang khusus mengatur tentang perpustakaan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pada pasal 22 ayat 4 dinyatakan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat. Selanjutnya pada pasal 48 ayat 4 dijelaskan bahwa pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, salah satunya dilakukan dengan mendirikan perpustakaan. Dalam konteks perpustakaan masjid, UU ini dapat menjadi salah satu payung hukum untuk para pengurus masjid dalam rangka memfasilitasi masyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat yang *well educated* atau terpelajar melalui "pendidikan sepanjang hayat" (*long life education*).

Dalam pada itu, jauh sebelum terbitnya UU Nomor 43 Tahun 2007, pada dekade 1990-an Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah membentuk Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) sebagai usaha pengembangan fungsi masjid yang tidak hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial keagamaan. Karena itu, keberadaan masjid diharapkan dapat menjadi sentral budaya umat Islam. Terkait dengan hal ini, pada tanggal 25 Februari 1991 Menteri Agama RI mengukuhkan Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) melalui SK Dewan Masjid Indonesia (DMI) Nomor: 06/DMI/PP/KPTS/II/1991 sebagai bagian dari usaha penguatan peran masjid bagi pusat pembelajaran umat. Dalam pedoman kerja BPPMI, perpustakaan masjid dibentuk sampai tingkat kecamatan di seluruh tanah air. Semangat ini diperkuat oleh Presiden RI pada acara Pembukaan MTQ Nasional XVI di Yogyakarta tahun 1991. Dalam sambutannya, ia menyatakan pentingnya pembangunan dan pengembangan perpustakaan masjid dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat muslim Indonesia.

Atas dasar semangat ini, kemudian berdirilah perpustakaan masjid di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia sebagai realisasi bagi terwujudnya masjid sebagai pusat pembedayaan umat. Kehadiran perpustakaan masjid ini mendapat respon yang baik dari pemerintah dan segenap komponen masyarakat sebagaimana terlihat dari banyaknya sumbangan dan bantuan buku, sarana dan prasarana perpustakaan, serta penyediaan dan pelatihan tenaga pengelola. Fenomena ini menarik diteliti, khususnya terkait dengan literatur Islam di perpustakaan masjid.

Untuk itu, Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama melakukan penelitian tentang " Literatur Islam pada Perpustakaan Masjid". Penelitian ini dilakukan di delapan wilayah di Indonesia yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan data awal yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan menggunakan studi kasus di 15 perpustakaan masjid, penelitian ini telah menghasilkan delapan laporan hasil penelitian yang merupakan studi awal yang bersifat eksploratoris dan monografis.

Masalah penelitian ini adalah bahwa masjid-masjid raya (besar) di Indonesia pada umumnya memiliki perpustakaan tetapi sejauhmana literatur Islam di perpustakaan-perpustakaan tersebut telah berfungsi bagi masyarakat? Oleh karena itu, berikut ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana relevansi koleksi literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya dengan kebutuhan jamaah?
2. Apa saja bidang kajian literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya?
3. Apa saja jenis karya dan bahasa yang digunakan pada literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya?
4. Bagaimana respons jamaah terhadap ketersediaan koleksi literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya?
5. Bagaimana manajemen pengelolaan Perpustakaan Masjid Raya?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Relevansi koleksi literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya dengan kebutuhan jamaah;
2. Bidang kajian literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya;
3. Jenis karya dan bahasa yang digunakan pada literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya;
4. Respons jamaah terhadap ketersediaan koleksi literatur Islam pada Perpustakaan Masjid Raya;
5. Manajemen pengelolaan Perpustakaan Masjid Raya.

Penelitian ini dilakukan di delapan provinsi dengan 15 masjid raya, yaitu:

1. Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh;
2. Perpustakaan Masjid Raya Taqwa Palembang;
3. Perpustakaan Masjid Agung Palembang;
4. Pusat Perpustakaan Islam Indonesia (PPII) Masjid Istiqlal, Jakarta;
5. Perpustakaan Jakarta Islamic Centre (JIC)/Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
6. Perpustakaan Masjid Raya Bandung;
7. Perpustakaan Masjid Agung Al-Ukhuwah, Bandung;
8. Perpustakaan Masjid Kauman Yogyakarta;
9. Perpustakaan Masjid Syuhada Yogyakarta;
10. Perpustakaan Masjid Raya At-Taqwa Mataram;
11. Perpustakaan Masjid Agung Al-Muttaqin, Mataram;
12. Perpustakaan Masjid Raya Makassar;
13. Perpustakaan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf, Makassar;
14. Perpustakaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin;
15. Perpustakaan Masjid Agung Miftahul Ihsan Kodya Banjarmasin;

B. Temuan Penelitian

1. Koleksi literatur di perpustakaan masjid raya sangat beragam dan tidak hanya literatur Islam.

2. Secara umum, koleksi literatur Islam di Perpustakaan Masjid dapat diklasifikasi sesuai dengan DDC seksi Islam, bahkan pada kasus tertentu dapat melampaui sistem klasifikasi yang ada. Meski demikian, tingkat persebaran dan jumlah koleksi untuk masing-masing bidang kajian seringkali tidak seimbang.
3. Bidang kajian yang terdapat pada koleksi literatur pada perpustakaan masjid raya hampir meliputi seluruh bidang kajian, dari umum sampai dengan keislaman misalnya buku-buku sains-teknologi, ekonomi, sosial-budaya, politik, manajemen, dan lain-lain. Demikian juga dengan buku-buku keislamannya, dari Islam umum seperti ensiklopedia, kumpulan karya, bunga rampai, dan lain-lain, hingga bidang khusus lainnya seperti Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Ulumul hadis, Akidah dan Ilmu Kalam, Fiqih dan Hukum Islam, Akhlak dan Tasawuf, Sejarah/Tarikh Islam, dan Biografi.
4. Peta literatur Islam koleksi perpustakaan masjid yang terdata dan sudah terolah adalah sebanyak 29.529 judul buku dengan sebaran sebagai berikut: Islam Umum (11,13%); Al-Qur'an dan Ilmu yang Berkaitan (9,83%); Hadis dan Ilmu yang Berkaitan (8,66%); Aqidah dan Ilmu Kalam (11,32%); Fiqih (18,67%); Akhlak Tasawuf (11,30%); Sosial dan Budaya (9,21%); Filsafat dan Perkembangan (8,09%); Aliran dan Sekte (1,76%); dan Sejarah Islam dan Biografi (10,03%). Pemetaan sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa koleksi buku tema fikih menempati proporsi terbesar (18,67%) dibanding koleksi lainnya. Hal tersebut cukup fungsional dengan kebutuhan membaca pengunjung perpustakaan yang pada umumnya memang membutuhkan buku tema Fiqih seputar kehidupan sehari-hari mereka, seperti: masalah ibadah, do'a-do'a, muamalah, hukum perkawinan (munahakat), hukum waris (faraid) dan wasiat, hukum pidana Islam (jinayat), hukum peradilan (Qada'), Ekonomi Islam, Pendidikan Islam, dan lain-lain.
5. Pengadaan koleksi literatur perpustakaan masjid umumnya diperoleh melalui bantuan para donatur, sementara pembelian langsung masih sangat terbatas. Akibatnya, ketersediaan literatur tidak berbanding seimbang dengan kebutuhan informasi keagamaan masyarakat. Bahkan, bantuan-bantuan buku itu potensial memunculkan konflik pemahaman keagamaan di masyarakat, atau buku-buku itu tidak fungsional sebagai bahan bacaan.
6. Jenis bahasa yang digunakan dalam literatur Islam pada perpustakaan masjid terdiri dari bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan bahasa ibu (daerah). Sedangkan jenis karya dari koleksi tersebut terdiri atas karya terjemahan dan karya asli, baik cetak maupun digital. Koleksi ini tersedia dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, dan CD/VCD.
7. Pengelolaan perpustakaan masjid belum dilakukan secara profesional, baik ketersediaan sarana prasarana, pelayanan pustaka, pengelolaan dan pengembangan koleksi, ketersediaan SDM, maupun ketersediaan dana.
8. Secara umum, koleksi perpustakaan masjid masih belum memenuhi kebutuhan pengguna, terkait dengan keragaman latarbelakang masyarakat.
9. Respons masyarakat terhadap ketersediaan koleksi literatur Islam di perpustakaan masjid secara umum terbatas pada kalangan terpelajar, bahkan dalam beberapa kasus hanya dikonsumsi oleh komunitas keagamaan tertentu. Hal ini terkait dengan pengadaan koleksi yang bersifat *top down* atau bahkan tanpa rencana, masih rendahnya minat baca masyarakat, serta pola transmisi keagamaan yang lebih mengutamakan pendekatan oral (ceramah).

C. Rekomendasi

1. Perlu pengadaan bahan literatur yang sesuai dengan kebutuhan umat secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan wacana keagamaan yang dilakukan penerbit dan penulis.
2. Perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang kreatif dan menguasai manajemen pengelolaan perpustakaan dengan baik, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Untuk optimalisasi manajemen pengelolaan perpustakaan perlu dikembangkan jaringan kerja antarperpustakaan masjid, memaksimalkan peran Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI), Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Daerah, perpustakaan perguruan tinggi, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Himpunan Masyarakat Pencinta Buku (HIMAPBU), dan lembaga perpustakaan lainnya. Bahkan melalui pengembangan perpustakaan digital, perpustakaan masjid dapat memberikan pelayanan secara online ke berbagai perpustakaan internasional.
4. Untuk meningkatkan peran masjid sebagai pusat peradaban, pemerintah (khususnya Kementerian Agama) perlu mengalokasikan dana rutin untuk pengelolaan Perpustakaan Masjid.
5. Perpustakaan Masjid perlu mengembangkan program pendukung bagi peningkatan kualitas pelayanan melalui penerbitan pamflet, brosur, buletin, bedah buku, bazar, lomba penulisan naskah keagamaan, lomba qira'atul-kutub, seminar keagamaan, dan lain-lain.
6. Untuk kepentingan pengembangan kebijakan, penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan lokakarya pengelolaan Perpustakaan Masjid dengan menghadirkan pengelola Perpustakaan Masjid, Perpustakaan Nasional RI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI), dan pejabat terkait.
7. Perlu dilakukan survei menyeluruh dalam rangka pemetaan potensi Perpustakaan Masjid secara nasional sebagai bahan kebijakan bagi pengembangan Perpustakaan Masjid. []